



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (LAKIP)  
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Kota Sukabumi Tahun 2009**

---

**Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi  
Jl.Mayawati Atas No.11 Kota Sukabumi Kode Pos 43113  
Telp./Fax (0266)212171**

## *Kata Pengantar*

*Segenap puja dan puji senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hati, mata, lisan dan pikiran kepada manusia. Salam atas semua utusan-Nya yang suci, para penyeru tauhid dan keadilan, terutama kepada yang paling mulia diantara mereka, yaitu Khataam al-Anbiya Muhamad Al Mustafa beserta keluarganya. Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT semata maka kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009.*

*Laporan ini merupakan perrwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.*

*Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.*

*Semoga LAKIP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi selama Tahun 2009 dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.*

*Sukabumi, Januari 2010*

**Kepala Kantor Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu  
Kota Sukabumi,**

**Drs.H.Yoyo Subagio,Msi**  
Pembina Tk.I  
NIP.195811181986031016

## Daftar Isi

	Halaman	
Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iii
Ihtisar Eksekutif		
Bab I Pendahuluan		
1.1 Latar Belakang	.....	
1.2 Landasan Hukum	.....	
1.3 Struktur Organisasi	.....	
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	.....	
1.5 Aspek-aspek Strategik Organisasi	.....	
1.6 Sistematika Penyusunan	.....	
Bab II Rencana Strategik		
2.1 Rencana Strategik		
2.2 Rencana Kinerja	.....	
Bab III Akuntabilitas Kinerja		
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	.....	
3.2 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	.....	
3.2.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran	.....	
3.2.2 Pengukuran Pencapaian Program	.....	
3.2.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan	.....	
3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja		
3.3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan		
3.3.2 Realisasi Anggaran Belanja		
3.3.3 Analisis Efisiensi dan Efektifitas		
Bab IV Kajian Potensi dan Peluang Investasi di Kota Sukabumi	.....	
4.1 Kajian Potensi Investasi di Kota Sukabumi	.....	
4.2 Kajian Peluang Investasi di Kota Sukabumi	.....	
Bab IV Penutup	.....	
Bab V Lampiran		

## Daftar Tabel

	Halaman	
Tabel 4.1 Inventarisasi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Sukabumi	.....	Bab IV - 1



## IHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi mempunyai fungsi sbb:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Visi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yaitu untuk tahun 2009 – 2013 yaitu "Pelayanan Prima dalam Menjamin Kepuasan dan Usaha Bersama". Adapun visi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) misi, 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran, 4 (empat) kebijakan dan 4 (empat) program.

Pada Tahun 2009 dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program berdasarkan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 telah dilaksanakan 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan. Adapun hasil penilaian kinerja internal terhadap capaian dari Renstra tersebut yaitu :

1. Sebagai kantor yang baru terbentuk, maka dalam evaluasi kinerja dalam akuntabilitas kinerja di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena tidak ada tahun pembanding (tahun 2008).
2. Pada umumnya program-program yang dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 telah sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang ditetapkan di Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009-2013.
3. Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari indikator kinerja output (keluaran) dan indikator kinerja outcome (dampak) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 telah mencapai 100%.
4. Dari analisis keuangan, pada sisi Anggaran Pendapatan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 penggunaan anggaran telah efektif dan efisien (realisasi penerimaan pendapatan naik 37% dari target yang telah ditetapkan). Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa dari anggaran yang telah ditetapkan di APBD Kota Sukabumi Tahun 2009, pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 secara fungsional berdampak positif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Dalam analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 telah efektif dan efisien.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka bebena tugas dan tanggung jawab Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi;
- d. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
- e. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- f. Surat Keputusan Walikota Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

## **1.3 Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Pasal 5,6,7,8,9,dan 10 disebutkan bidang tugas unsur-unsur kantor di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dibantu oleh jajaran struktural ;
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

- c. Kepala Seksi Penanaman Modal
- d. Kepala Seksi Bina Program dan Informasi

Sebagai kantor yang baru, jumlah pegawai pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi masih terbilang minim yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai yaitu terdiri dari :

- a. Jabatan Struktural : 5 orang
- b. Staf/PNS : 8 orang

Adapun menurut komposisi tingkat pendidikan pegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yaitu :

- a. S2 : 1 orang
- b. S1 : 7 orang
- c. D3 : 1 orang
- d. SMA : 3 orang
- e. SD : 1 orang

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi maka dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi mempunyai fungsi sbb:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

### **Aspek-aspek Strategik Organisasi**

Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategik organisasi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas;
2. Tersedianya sdm yang professional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;
4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas;
5. Penerapan kesepuluh asas-asas pelayanan publik secara konsekuen;
6. Penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang up to date ;
7. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Kota Sukabumi;
8. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.

### **Sistematika Penyusunan**

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- Bab I     Pendahuluan
- Bab II    Rencana Stratejik
- Bab III   Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV    Penutup
- Lampiran

## **BAB II RENCANA STRATEGIK**

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu rencana strategik merupakan kebutuhan nyata dari tiap OPD dalam menghadapi persoalan yang dihadapi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

### **2.1 RENCANA STRATEGIK**

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Penyusunan Rencana strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota tidak dapat terlepas pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 yang termuat dalam Perda Kota Sukabumi No.7 Tahun 2008 Daerah No.12 dengan visi : "Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat berlandaskan Iman dan Taqwa" yang diwujudkan secara bertahap pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 2008 Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dengan visinya yaitu "Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah Berparadigma Surgawi Menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera".

Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi menggunakan metode deskriptif dan induktif dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literatur. Adapun Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013 yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan diuraikan sebagai berikut :

## **I. VISI**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka Visi Kantor Penanaman Modal Kota Sukabumi yaitu:

**“Pelayanan Prima dalam Menjamin Kepuasan dan  
Usaha Bersama”**

Pernyataan visi diatas dimulai dari adanya Fungsi utama pemerintah yaitu memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD.

Visi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukung sesuai dengan tahapan-tahapan rencana strategik.

## **II. Misi**

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Misi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yaitu :

- Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas pelayanan;
- Misi Kedua : Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha khususnya di Kota Sukabumi

## **III. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

- Misi pertama** : Meningkatkan kualitas pelayanan;
- Tujuan : Terwujudnya KPMPT sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya di Kota Sukabumi
- Sasaran : Penyederhanaan mekanisme perijinan dengan sistem pelayanan yang prima. Indikator sasaran ini yaitu 100% perijinan dapat diterbitkan sesuai dengan jumlah perijinan yang mendaftar (dengan catatan berkas perijinan yang masuk telah lengkap persyaratannya).
- 
- Misi kedua** : Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha khususnya di Kota Sukabumi
- Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di Kota Sukabumi dalam menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Sukabumi
- Sasaran : Meningkatkan sosialisasi tentang investasi di Kota Sukabumi. Adapun indikator tercapai sasaran tersebut yaitu adanya peningkatan Nilai Investasi PMA sebesar Rp.2.835.000.000 pada tahun 2013 dan Nilai Investasi PMDN sebesar Rp. 107.185.980.793.

#### **IV. Strategi**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan KPMPT

Penetapan strategi kebelakang dimaksudkan untuk menginventarisir dasar-dasar hukum tentang perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada KPMPT. Acuan terhadap wewenang dan dasar-dasar hukum yang tegas merupakan modal dalam fungsi dan peran KPMPT sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kota Sukabumi.

b. Strategi Integrasi ke Depan

Penetapan strategi integrasi ke depan dimaksudkan untuk mewujudkan KPMPT sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang HANDAL professional . Hal ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional KPMPT.

c. Strategi Penguatan ke Dalam

Penetapan strategi penguatan ke dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun fasilitator investasi professional dengan perbaikan manajemen organisasi dalam eksistensi KPMPT sebagai kantor yang baru terbentuk.

#### **V. Kebijakan**

Berdasarkan hasil formula strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pelayanan yang prima.

2. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan maupun fasilitator investasi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.
4. Meningkatkan daya tarik investasi Kota Sukabumi.

Adapun Matrik rencana stratejik Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Stratejik Tahun 2009 s/d 2013**

**RENCANA STRATEJIK**  
**TAHUN 2009 S/D 2013**

Instansi : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi  
 Visi : Pelayanan Prima Dalam Menjamin Kepuasan dan Usaha Bersama  
 Misi kesatu : Meningkatkan kualitas pelayanan  
 Misi kedua : Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha khususnya di Kota Sukabumi

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya KPMPPT sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya di Kota Sukabumi	Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan prima	Ijin yang diterbitkan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan publik yang prima  Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan maupun fasilitator investasi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi  Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Perizinan  Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana & Prasarana Daerah  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
Terbentuknya iklim investasi yg kondusif di Kota Sukabumi dalam menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Sukabumi	Meningkatkan sosialisasi tentang investasi di Kota Sukabumi	Nilai Investasi PMA  Nilai Investasi PMDN	Meningkatkan daya tarik investasi Kota Sukabumi	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	

Sumber : Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013

## **2.2 RENCANA KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam bentuk Program Kerja Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Promosi dan Kerjasama Investasi, kegiatannya yaitu :  
Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal
  
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi , kegiatannya yaitu :
  - a. Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi;
  - b. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah;
  - c. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka akuntabilitas kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sebagai kantor yang baru terbentuk, maka dalam evaluasi kinerja dalam akuntabilitas kinerja di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena tidak ada tahun pembandingan (tahun 2008).
- 2) Pencapaian sasaran dari misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kota Sukabumi yaitu Mewujudkan KPMPT sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya di Kota Sukabumi dan Memberikan iklim investasi yang kondusif di Kota Sukabumi dalam menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Sukabumi telah dapat tercapai. Hal ini berarti Tugas Pokok dan Fungsi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu dapat tercapai.
- 3) Ketercapaian program di yang sesuai dengan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 - 2013 adalah sebesar 50%, yang berarti ada 2 (dua) program yang telah dilaksanakan dari 4 (empat) program yang direncanakan.
- 4) Dalam analisis keuangan, pada sisi Anggaran Pendapatan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 penggunaan anggaran telah efektif dan efisien (realisasi penerimaan pendapatan naik 37% dari

target yang telah ditetapkan). Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa dari anggaran yang telah ditetapkan di APBD Kota Sukabumi Tahun 2009, pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 secara fungsional berdampak positif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

- 5) Dalam analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 telah efektif dan efisien.
- 6) Adapun masalah ataupun hambatan yang dijumpai antara lain :
  - a. Kurangnya jumlah SDM yang ada di KPMPT, idealnya untuk suatu kantor pelayanan jumlah sumber daya manusia itu lebih dari 20 orang. Adapun kenyataannya hanya 13 orang.
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan dan investasi.
  - c. Masih belum terkoordinasinya data tentang inventarisasi investasi dan pelayanan perijinan.
  - d. Belum adanya penyederhanaan prosedural dan mekanisme perijinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang up to date ;
  - e. Belum adanya penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas;
  - f. Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Kota Sukabumi;
  - g. Belum adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya;

- 2) Upaya untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut dilakukan antara lain melalui :
- a. Sudah diupayakan untuk meminta tambahan personil kepada badan kepegawaian dan Diklat Kota Sukabumi.
  - b. Telah dilaksanakannya kegiatan pengadaan sarana komputer pada Tahun 2009 untuk menunjang kegiatan di KPMPT.
  - c. Telah diupayakan untuk meminta data-data tentang perijinan dan investasi dari OPD yang berkaitan serta adanya pengambilan data primer kepada perusahaan ataupun objek-objek yang berkaitan dengan investasi.
  - d. Telah disusun rancangan Standar Operasional dari tujuh pelayanan perijinan di KPMPT yang pada Tahun 2010 akan diajukan untuk menjadi Peraturan Walikota.
  - e. Telah diupayakan untuk dibentuk SK Tim Teknis Perijinan yang secara kontinue melakukan pertemuan dalam Rapat Teknis Perijinan.
  - f. Telah diajukan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring pada Tahun Anggaran 2010.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Sukabumi dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam terwujudnya penyusunan laporan ini disampaikan terimakasih, semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Amin Ya Robbal A'lam.

Sukabumi, Januari 2010

**Kepala Kantor Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu  
Kota Sukabumi,**

**Drs.H.Yoyo Subagio,Msi**

Pembina Tk.I

NIP.195811181986031016



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja suatu OPD. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pada evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sebagai kantor yang baru terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Sukabumi, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Apabila melihat poin 2 (dua) dari faktor-faktor perbandingan dalam evaluasi kinerja, maka akuntabilitas kinerja di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi **tidak dapat dilakukan**, karena tidak ada perbandingan hasil kinerja tahun sebelumnya (tahun 2008). Akan tetapi dalam bab ini yang dapat dicoba di analisis adalah analisis keuangannya yang ada di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 beserta analisis pencapaian kinerja kegiatan-kegiatannya .

### **3.1 ANALISIS KEUANGAN**

Analisis keuangan merupakan analisis yang menelaah aspek keuangan yang ada di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Dalam APBD Kota Sukabumi Tahun 2009 dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan :
  - Retribusi IMB
  - Retribusi Ijin Gangguan/HO
  - Retribusi IUJK
- b. Anggaran Belanja :
  - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)
  - Belanja Barang dan Jasa
  - Belanja Modal

### 3.3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan

Realisasi Anggaran Pendapatan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009**

No.	Uraian Pendapatan	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Penerimaan (Rp.)	Selisih/bertambah (Rp.)	Persentase kenaikan/penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Retribusi IMB	550.000.000,00	729.849.070,00	179.849.070,00	25
2.	Retribusi Ijin Gangguan/Ho	100.000.000,00	164.431.250,00	64.431.250,00	39
3.	Retribusi IUJK	15.000.000,00	18.775.000,00	3.775.000,00	20
	<b>Jumlah</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>931.055.320,00</b>	<b>248.055.320,00</b>	<b>37</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009.

Dari tabel itu dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi anggaran pendapatan Tahun 2009 di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi mengalami kenaikan dengan rentang persentase tiap pendapatan retribusi sebesar 20 – 39%. Adapun persentase kenaikan keseluruhan realisasi pendapatan retribusi dari target anggaran yaitu 37%. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa adanya perbaikan kinerja pelayanan perizinan setelah di bentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yang sesuai dengan amanah Permendagri No.24 Tahun 2006 dimana menyebutkan bahwa Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun pengertian dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

### 3.3.2 Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran Belanja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 \***

No.	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih/bertambah (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>387.067.000,00</b>	<b>374.420.358,00</b>	<b>(12.646.642)</b>
1.	Belanja Pegawai	387.067.000,00	374.420.358,00	(12.646.642)
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>696.779.000,00</b>	<b>549.123.524,00</b>	<b>(147.655.476)</b>
1.	Belanja Pegawai	183.609.000,00	52.268.682,00	(131.340.318,00)
2.	Belanja barang dan Jasa	258.320.000,00	249.169.842,00	(9.150.158,00)
3.	Belanja Modal	254.850.000,00	247.685.000,00	(7.165.000,00)
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung</b>		<b>1.083.846.000,00</b>	<b>923.543.882,00</b>	<b>(145.972.118,00)</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009.

Keterangan :

\* : APBD Kota Sukabumi setelah perubahan Tahun 2009

Alokasi Anggaran Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 sebelum perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2009 yaitu sebesar Rp.1.217.917.000,00. Apabila dipersentasekan alokasi anggaran Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 sebelum perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2009 yaitu sebesar 0,23%. Setelah perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2009 yaitu sebesar Rp.1.083.846.000,00 (0,18% dari APBD Kota Sukabumi Tahun 2009). Hal ini berarti ada penurunan alokasi anggaran untuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 setelah perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2009 sebesar Rp.134.071.000,00 (mengalami penurunan sebesar 11%). Adapun alasan penurunan ini terutama pada belanja tidak langsung (belanja pegawai) dimana jumlah personil yang akan dibayarkan belanja pegawai (gaji dan

tunjangan serta tambahan penghasilan PNS) masih kurang jumlahnya, sehingga alokasi untuk belanja pegawai dikurangi.

Akan tetapi untuk Belanja Langsung, adanya sisa anggaran atau anggaran yang tidak digunakan karena ada beberapa pos belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Hal ini telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, yaitu karena Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi merupakan kantor yang baru, maka anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kota Sukabumi Tahun 2009 masih merupakan prediksi dari tim anggaran.

### **3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2009**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Pimpinan LAN Nomor 239 Tahun 2003, kinerja instansi Pemerintah Kota Sukabumi dan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan

pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

### **3.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Tahun 2009 yang terkait dengan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013.

Pengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja berpengaruh kepada target pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2009, sehingga perkembangan dan hasil yang didapat akan terlihat pada PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) dan PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), sebagaimana dapat dilihat pada lampiran dari LAKIP Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 ini.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan merupakan suatu hasil penilaian dari berbagai indikator kinerja,yakni :

**a. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts).

**b. Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator kinerja sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, indikator kinerja sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

**c. Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam berbagai pemahaman sebagai berikut :

1. **Kelompok Indikator Inputs** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu dan peraturan.
2. **Kelompok Indikator Outputs** adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

3. **Kelompok Indikator Outcomes** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluangan kegiatan jangka waktu menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap jasa dapat memenuhi harapan masyarakat.
4. **Kelompok Indikator Benefits** adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. **Kelompok Indikator Impacts** adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

### **3.2.2 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Tahun 2009**

Pengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja berpengaruh kepada target pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2009, sehingga perkembangan dan hasil yang didapat akan terlihat pada PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) dan PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), sebagaimana dapat dilihat pada lampiran dari LAKIP Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 ini.

### **3.2.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan . Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.

Adapun kinerja sasaran yang akan diukur dan dievaluasi selama Tahun 2009 berdasarkan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013. Pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Pencapaian Sasaran**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan system pelayanan prima	Ijin yang diterbitkan	*100%	*100%	*100%	* berkas persyaratan lengkap, ijin diterbitkan
Meningkatnya sosialisasi tentang investasi di Kota Sukabumi	Nilai Investasi PMA	Rp.2.835.000.000	Rp.2.700.000.000	95,24%	
	Nilai Investasi PMDN	Rp.107.185.980.793	Rp.103.003.620.747	96,09%	

Sumber : Hasil Analisis,2010

Dari tabel tersebut maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam indikator sasaran visi misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013, maka sasaran yang diharapkan dalam menunjang visi misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi telah tercapai dengan rentang pencapaian 95% - 100%.

Nilai persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu dapat tercapai.

### **3.2.4 Pengukuran Pencapaian Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Pada Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013 disebutkan bahwa berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran KPMPT maka menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membuat program-program selama 5 (lima ) tahun. Dalam tabel Rencana Strategik KPMPT 2009 sampai dengan 2013 dihasilkan 4 (empat) program yang akan dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Perizinan, Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Pada tahun 2009 di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi terdapat 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi. Apabila dibandingkan dengan program-program yang harus ada dalam Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2009 s.d 2013, maka ketercapaian program yang sesuai dengan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2009 - 2013 adalah sebesar 100%. Di Tahun 2009, untuk kegiatan yang mendukung pelayanan perizinan masih disimpan dalam Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi. Hal ini diakibatkan tidak ada nomor rekening dengan nomenklatur pelayanan perizinan yang sesuai dengan permendagri Nomor.13 Tahun 2006. Oleh sebab itu maka pada Tahun 2009 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi mengajukan penambahan program dengan nomenklatur yang sesuai dengan pelayanan perizinan yaitu Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan.

### **3.2.5 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu aktivitas nyata yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperhatikan aspek kebijakan dan program yang telah digariskan. Selanjutnya dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dari 2 (dua) program yang ada selama tahun 2009 tergambar pada indikator kinerja yang diharapkan, baik input, output dan outcome yang secara umum keseluruhannya dapat dilaksanakan (100%), dan walaupun tidak tercapai pada dasarnya kegiatan minimal sudah diusahakan untuk dilaksanakan. Adapun pengukuran kinerja kegiatan selama Tahun 2009 disajikan dalam uraian dibawah ini.

#### **1. Program Perencanaan Promosi dan Kerjasama Investasi**

##### **a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal**

Pengukuran kinerja Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal Tahun 2009 dengan indikator-indikator kinerja,

Rencana Tingkat Capaian (Target), Realisasinya serta persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal Tahun 2009**

Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target)
1	2	3	4	5
<u>Masukan :</u>				
Dana : Rp.63.914.000	Rupiah	63.914.000	56.871.750	89%
Waktu : 12	Bulan	12	12	100%
SDM : 13	Orang	13	13	100%
<u>Keluaran :</u> Tersedianya buku profil investasi, buku kajian, rapat koordinasi	Buah	306	306	100%
<u>Hasil :</u> Terkoordinasinya perencanaan dan pengembangan modal	%	70	70	100%
<u>Manfaat :</u> Ketersediaan buku profil investasi dan kebijakan penanaman modal	%	70	70	100%
<u>Dampak :</u> Peningkatan perencanaan promosi dan kerjasama investasi	%	70	70	100%

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk persentase capaian Rencana Tingkat Capaian (target) dalam indikator kinerja masukan (input) dana hanya terserap 89%. Hal ini dikarenakan sebagai kantor yang baru terbentuk, alokasi anggaran di kantor ini tidak berdasarkan perencanaan yang komprehensif. Alokasi anggaran hanya berdasarkan prediksi anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Kota Sukabumi di Tahun 2008. Alokasi anggaran Tahun 2009 di Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal dalam pos belanja perjalanan dinas yang paling banyak tidak dapat diserap (hanya 76% anggaran yang terserap) karena tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Jumlah Dana yang dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas yaitu sebanyak Rp.13.200.000,00.

Akan tetapi dalam pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari indikator kinerja output (keluaran) dan indikator kinerja outcome (dampak) mencapai 100%.

## 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- a. Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
- Pengukuran kinerja Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Tahun 2009 dengan indikator-indikator kinerja, Rencana Tingkat Capaian (Target), Realisasinya serta persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi**  
**Kerjasama di Bidang Investasi Tahun 2009**

Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target)
3	4	5	6	7
Masukan :				
Dana : Rp.51.000.000	Rupiah	51.000.000	38.238.165	75%
Waktu : 12	Bulan	12	12	100%
SDM : 109	Orang	109	109	100%
Keluaran : Seminar/lokakarya tentang investasi	kali	1	1	100%
Hasil : Terfasilitasi dan terkoordinasinya kerja sama di bidang investasi baik di Kota Smi maupun dengan daerah lain				
Manfaat : menjadi fasilitator dalam koordinasi kerjasama di bidang investasi	%	70	70	100%
Dampak : Peningkatan investasi di Kota Smi	%	70	70	100%

Sumber : Hasil Analisis,2010

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk persentase capaian Rencana Tingkat Capaian (target) dalam indikator kinerja masukan (input) dana hanya terserap 75 %.

Hal ini seperti yang telah disebutkan pada uraian dalam penilaian pencapaian sasaran, Sebagai kantor yang baru terbentuk, alokasi anggaran di kantor ini tidak berdasarkan perencanaan yang



Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk persentase capaian Rencana Tingkat Capaian (target) dalam indikator kinerja masukan (input) dana hanya terserap 88%. Hal ini disebabkan adanya penurunan biaya pengadaan dengan adanya sistem tender serta penyerapan alokasi anggaran yang tidak seluruhnya, dimana alokasi anggaran yang paling banyak tidak terserap pada Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah Tahun 2009 adalah pos belanja biaya perjalanan dinas yang hanya sebesar 46%. Jumlah dana yang dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas yaitu sebanyak Rp.20.920.000,00.

Akan tetapi dalam pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari indikator kinerja output (keluaran) dan indikator kinerja outcome (dampak) mencapai 100%.

c. Kegiatan Kajian-Kajian Penanaman Modal

Pengukuran kinerja Kegiatan Kajian-kajian Penanaman Modal Tahun 2009 dengan indikator-indikator kinerja, Rencana Tingkat Capaian (Target), Realisasinya serta persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Tahun 2009**

Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target)
1	2	3	4	5
Masukan :				
Dana : Rp.125.000.000	Rupiah	125.000.000	53.290.441	43%
Waktu : 6	Bulan	6	6	100%
SDM : 20	Orang	20	20	100%
Keluaran : Buku Kajian Investasi Kota Sukabumi	Buku	68	68	100%
Hasil : Tersedianya pendataan dan pedoman tentang investasi di Kota Sukabumi	%	70	70	100%
Manfaat : menjadi bahan acuan dalam kebijakan penanaman modal	%	70	70	100%
Dampak : Peningkatan pendataan dan investasi di Kota Smi	%	70	70	100%

Sumber : Hasil Analisis,2010

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk persentase capaian Rencana Tingkat Capaian (target) dalam indikator kinerja masukan (input) dana hanya terserap 43%.

Hal ini seperti yang telah disebutkan pada uraian dalam penilaian pencapaian sasaran, Sebagai kantor yang baru terbentuk, alokasi anggaran di kantor ini tidak berdasarkan perencanaan yang komprehensif. Alokasi anggaran hanya berdasarkan prediksi anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Kota Sukabumi di Tahun 2008. Alokasi anggaran Tahun 2009 di Kegiatan Kajian-kajian Penanaman Modal Tahun 2009 dalam pos belanja perjalanan dinas yang paling banyak tidak dapat diserap (hanya 46% anggaran yang terserap) karena tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Jumlah dana yang dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas yaitu sebanyak Rp.26.400.000,00.

Akan tetapi dalam pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari indikator kinerja output (keluaran) dan indikator kinerja outcome (dampak) mencapai 100%.

### **3.3 Analisa Efisiensi dan Efektivitas**

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output.

Analisis Efektifitas dilakukan dengan memperbandingkan outcome dengan output nya baik rencana maupun realisasinya. Efektifitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome.

Memperhatikan maksud utama dari akuntabilitas kinerja yakni mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai sasaran, maka dari data mengenai pengelola anggaran oleh Anggaran Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 dapat diketahui kehematan dan efisiensinya.

Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan program/kegiatan memperlihatkan proses evaluasi yang didapat setelah membandingkan tahap rencana alokasi anggaran, baik berupa target yang harus dicapai maupun penggunaan sumber daya/dana yang tersedia pada sektor belanja adalah memiliki hubungan yang erat pada tahap evaluasi yang dianalisa pada tingkat hasil yang dicapai.

Pada sisi Anggaran Pendapatan, ditetapkan pada APBD Kota Sukabumi Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Retribusi Daerah yang berasal dari IMB, Ijin Gangguan/HO, dan IUJK adalah sebesar Rp.665.000.000,00. Adapun realisasinya adalah Rp. 913.055.320,00 (naik 37%). Angka ini memperlihatkan bahwa di anggaran pendapatan, penggunaan anggaran telah efektif dan efisien. Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa dari anggaran yang telah ditetapkan di APBD Kota Sukabumi Tahun 2009, pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 secara fungsional berdampak positif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun analisis efisiensi dan efektifitas pada penggunaan Belanja Langsung (pelaksanaan program/kegiatan) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan-kegiatan di**  
**Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi**  
**Tahun Anggaran 2009**

No.	Kegiatan	Input		Output		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan	%	%	Keterangan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rumus (%)	Efisiensi	Efektifitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal	Rp. 63.914.000	Rp. 56.871.750	306 buku	306 buku	208.869	185.855	111,018	11,018	100	Efisien & Efektif
2.	Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Rp. 51.000.000	Rp. 38.238.165	109 peserta	109 peserta	467.890	350.809	125,02	25,02	100	Efisien & Efektif
3.	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Rp. 226.943.000	Rp. 199.590.450	1 paket	1 paket	226.943.000	199.590.450	112,05	12,05	100	Efisien & Efektif

4.	Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Rp. 125.000.000	Rp. 53.290.441	68 buku	68 buku	1.838.235	783.700	157,37	57,37	100	Efisien & Efektif
----	---	-----------------	----------------	---------	---------	-----------	---------	--------	-------	-----	-------------------

Sumber : Hasil Analisis,2010

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua kegiatan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 telah efisien dan efektif. Nilai efisiensi (penghematan) ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun nilai penghematan ini berkisar dari 11% - 58%. Alasan penghematan ini dikarenakan sebagai kantor yang baru terbentuk, alokasi anggaran di kantor ini tidak berdasarkan perencanaan yang komprehensif. Alokasi anggaran hanya berdasarkan prediksi anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Kota Sukabumi di Tahun 2008.. Sedangkan nilai efektifitas yang ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome yang berada pada nilai efektifitas 100%. Hal ini berarti seluruh kegiatan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2009 dapat menghemat penggunaan dana dengan menghasilkan output yang sesuai dengan rencana.



## **BAB V LAMPIRAN**

Pada bab ini akan ditampilkan tambahan-tambahan penjelasan baik itu berupa tabel, gambar atau peraturan-peraturan yang menjelaskan dan mendukung uraian yang telah disajikan pada bab-bab selanjutnya.